

Sejarah Untuk Mendapatkan Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia

Teddy Aprilzal

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Email: teddyaprilzal@students.unnes.ac.id

Abstract : *This article was written to find out the recognition of the sovereignty of the Republic of Indonesia in the war that occurred as a result of the Dutch military aggression II which had the aim of destroying and annihilating the Republic of Indonesia from the results of the Proclamation of Indonesian Independence on August 17, 1945. The climax of this war was carried out through guerrilla warfare. to block the general attack on March 1, 1949. This recognition of the sovereignty of the Republic of Indonesia received support from various countries in Asia with the New Delhi conference organized by India and western countries, namely the United States. With the participation of the United States, Australia gave its support. The world reaction to the Dutch military aggression II was held by a session of the World Security Council (UN). Ir. Soekarno as a figure who has an important role and influence in Indonesia, the United Nations invited him and the Netherlands to carry out KMB negotiations which resulted in the Roem-Royem agreement which was held in Jakarta. Then several negotiations were held between Indonesia and the BFO which took place twice in the KMB. KMB is very historic and plays an important role in obtaining recognition of the sovereignty of the Republic of Indonesia which was declared by the Netherlands on December 27, 1949, that the Netherlands recognized the sovereignty of the Republic of Indonesia de facto and de jure.*

Keywords: *War, Dutch Military Aggression, Conference, Sovereignty of the Republic of Indonesia.*

Abstrak : Artikel ini tulis untuk mengetahui pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dalam perang yang terjadi akibat dari agresi militer Belanda ke II yang memiliki tujuan untuk menghancurkan dan memusnahkan Republik Indonesia dari hasil Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Puncaknya perang ini yang dilakukan melalui perang gerilya untuk menghadang serangan umum 1 Maret 1949. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia ini mendapat dukungan dari berbagai negara-negara di Asia dengan konferensi New Delhi yang diselenggarakan oleh negara India serta negara-negara barat yaitu Amerika Serikat. Atas keikutsertaan Amerika Serikat ini membuat negara Australia memberikan dukungannya. Reaksi dunia atas agresi militer Belanda ke II diadakanlah suatu sidang oleh Dewan Keamanan Dunia (PBB). Ir. Soekarno sebagai tokoh yang memiliki peranan penting serta pengaruh di Indonesia, PBB mengundangnya serta Belanda untuk melakukan perundingan KMB yang menghasilkan perjanjian Roem-Royem yang diselenggarakan di Jakarta. Kemudian dilakukan beberapa perundingan antara Indonesia dengan pihak BFO yang berlangsung sebanyak dua kali dalam KMB. KMB sangat bersejarah dan berperan penting untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia yang dideklarasikan Belanda pada 27 Desember 1949, bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto dan de jure.

Kata Kunci: Perang, Agresi Militer Belanda, Konferensi, Kedaulatan Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Agresi militer Belanda ke II dimulai pada tanggal 19 Desember 1948, dengan dilakukannya penyerangan kepada Maguwo serta penduduk terhadap daerah Yogyakarta. Maksud Belanda untuk menghancurkan dan memusnahkan Republik Indonesia. Penyerangan tersebut jelas dilakukan secara tiba-tiba oleh pihak Belanda dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati pada saat konferensi Komisi Tiga Negara. Tidak terima dengan serangan yang dilakukan oleh Belanda, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki martabat, kemudian bangkit dengan melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan dengan melakukan serangan gerilya serta melakukan serangan secara umum terhadap pendudukan Belanda.

Ini cukup memberikan bukti kepada Belanda bahwa bangsa Indonesia itu bisa melakukan perlawanan, sehingga usaha Belanda untuk menghancurkan republik Indonesia hasil dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu gagal. Meskipun pemimpin dari bangsa Indonesia yaitu Presiden, Wakil Presiden dan para Menterinya ditawan dan dijadikan sandera oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948 agresi militer ke II yang dilakukan oleh pihak Belanda, mendapatkan tanggapan dari bangsa Indonesia. Dorongan yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia dan merupakan bangsa yang terhormat, peristiwa ini justru menjadikan perhatian dunia terhadap bangsa Indonesia yang ingin mempertahankan kedaulatannya.

Negara India melakukan suatu konferensi Asia diselenggarakan di New Delhi yang mendapatkan dukungan dari negara-negara di Asia, yang menghasilkan resolusi untuk masalah yang dihadapi Indonesia di meja PBB. Resolusi yang diajukan di PBB ini menyebutkan masalah Indonesia terhadap Belanda yang melakukan agresi militernya yang ke II tersebut dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Kemudian dilakukanlah lagi suatu perundingan-perundingan yang menghasilkan suatu perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini hasil dari konferensi Indonesia di KMB. Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan suatu Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, yang menghasilkan suatu peristiwa penting bersejarah untuk bangsa Indonesia. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Belanda menandatangani surat perjanjian untuk mengakui Kedaulatan Republik Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu sudah merdeka dan sudah mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Akan tetapi, sejak peristiwa itu Indonesia baru resmi diakui kedaulatannya oleh bangsa Belanda serta mundurnya Belanda untuk melakukan pendudukan lagi di Indonesia.

Pada dasarnya agresi adalah suatu upaya tingkah laku dengan maksud tujuan untuk sengaja menyakiti orang lain secara fisik ataupun psikis. Arti lain agresi adalah bentuk tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan kekerasan fisik ataupun verbal kepada sekelompok orang maupun individu. Sedangkan perang merupakan suatu perilaku yang menggunakan kekerasan pada fisik maupun non fisik kepada orang lain, baik itu dalam bentuk kelompok maupun suatu wilayah yang didominasi. Perang adalah wujud dari bentuk untuk membela diri sendiri terhadap

orang lain yang kiranya dianggap baik. Sebelum membahas tentang lanjut, mari melihat kelisan balik mengenai peristiwa dimulainya agresi militer Belanda yang pertama yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agresi Militer Belanda ke 1

Terjadinya agresi militer Belanda ke 1 ini adalah bangsa Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan Belanda berencana untuk menduduki wilayah Indonesia dengan diboncengi oleh NICA serta sekutunya. Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dengan tujuan untuk menjadi wilayah Republik Indonesia sebagai negara persemakmurnya. Akan tetapi, Bangsa Indonesia tidak mau dijadikan sebagai wilayah persemakmuran oleh bangsa Belanda. Karena Indonesia telah merdeka dengan cara proklamasi kemerdekaan. Tidak terima dengan pernyataan Indonesia, akhirnya bangsa Belanda melakukan gencatan senjata dan dengan adanya peristiwa ini masak terjadilah agresi militer Belanda ke 1.

Belanda ingin menjajah Indonesia kembali dikarenakan bangsa Belanda mengalami keterpurukan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan persenjataannya dalam perang. Belanda melakukan agresi militer pertamanya pada tanggal 21 Juli 1947 yang berhasil menguasai kota-kota besar yang ada di wilayah Indonesia yang memiliki peranan penting. Kota-kota besar di Indonesia yang berhasil dikuasai oleh Belanda adalah Jakarta, Semarang, Medan, Padang dan Palembang yang berada di Jawa dan

Sumatra. Aksi militer Belanda pertama yang mendadak ini berhasil menduduki daerah-daerah pertanian dan pabrik yang berada di kawasan Jawa dan Sumatra. Serta berhasil menguasai Yogyakarta yang merupakan pusat politik pada saat itu dan berhasil menawan para pemimpin negara.

Pada tanggal 15 Juli 1947 Jenderal Belanda yang bernama Van Mook melakukan deklarasi terhadap wilayah Indonesia, yang harus bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang singkat kurang lebih dua Minggu setelah deklarasi tersebut disampaikan. Pada akhirnya pemerintah Indonesia tidak bisa menyelesaikan deklarasi yang disampaikan oleh Belanda tersebut yang membuat wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan kecil, akibat dari tidak terselesaikannya deklarasi tersebut.

Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang dibuat setelah bangsa Belanda melakukan aksi agresi militer pertamanya di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Atas dasar Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan ingin kembali menguasai wilayah Republik Indonesia. Sebelum dilakukannya perjanjian Linggarjati jadi, Indonesia dan Belanda telah melakukan perundingan sebanyak 4 kali. Akan tetapi tidak ada dari satupun perundingan tersebut yang membuatkan hasil. Karena Belanda selalu melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Indonesia. Dari aksinya Belanda ini yang selalu melanggar perjanjian membuat Indonesia selalu mengalami kerugian. Salah satu Belanda melanggar perjanjian adalah hanya mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto

untuk wilayah Indonesia di Jawa dan Madura, sedangkan untuk Sumatra bangsa Belanda tidak mengakuinya. Belanda kelihatannya sengaja melakukan pelanggaran tersebut.

Disisi lain, nampaknya Inggris ingin menjadi penengah dari masalah antara pihak Belanda dan Indonesia. Untuk itu, pemerintah Inggris mengutuskan orangnya yang bernama Lord Killearn untuk menjadi penengah atas masalah bangsa Belanda dan Indonesia dalam perundingan yang akan digelar kedepannya. Hingga pada tanggal 11 November 1946 sampai 15 November 1946 dilakukan perundingan yang dihadiri oleh kedua belah pihak dengan perwakilannya masing-masing. Dari Indonesia sendiri diwakili oleh Sutan Syahrir dan dari pihak Belanda diwakili oleh Schermerchon. Perundingan ini dengan dengan nama perjanjian Linggarjati yang menghasilkan 17 pasal didalamnya.

Perjanjian Linggarjati tersebut membuat kekhawatiran dari kedua belah pihak antara Belanda dan Indonesia. Dari pihak Indonesia sendiri menganggap perjanjian Linggarjati adalah suatu kesalahan yang dimana merugikan Indonesia karena Belanda pasti akan melanggar perjanjian tersebut. Sedangkan, dari pihak Belanda sendiri juga merasakan hal yang sama. Karena perjanjian Linggarjati tersebut membuat para penguasa pabrik yang berada di Indonesia tidak dapat menguasainya lagi. Ini jelas-jelas sangat merugikan pihak Belanda yang memiliki tujuan utama untuk menduduki Indonesia kembali.

Pada tanggal 25 Maret 1947, perjanjian Linggarjati resmi di tangan oleh Belanda dan Indonesia secara sah. Dengan menghasilkan perjanjian Linggarjati sebagai berikut: 1). Diakuinya Indonesia secara de facto oleh

Belanda di wilayah Jawa, Madura, Sumatra dan kekuatan Belanda atas Indonesia dikembalikan secara utuh. 2). Dibentuknya ketatanegaraan berupa Negara Indonesia Serikat. 3). Terbentuknya Uni Belanda-Indonesia. 4). Melindungi hak-hak Belanda di Indonesia. 5). Sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara melalui diplomasi.

Terjadinya Agresi Militer Belanda ke II

Latar belakang terjadi agresi militer Belanda ke II itu akibat dari ketidakpuasan Belanda atas perjanjian Renville yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 hingga tanggal 17 Januari 1948. Bisa dilihat dari ketidakpuasan Belanda pada perundingan yang sering melakukan penolakan keputusan oleh KTN yang akan diajukan ke dewan keamanan PBB. Penolakan yang dilakukan Belanda ini karena belum terselesaikannya masalah gencatan senjata yang membuat perundingan mengalami hambatan. Tidak tinggal diam, Indonesia menyatakan ketertarikannya penyebab terjadinya gencatan senjata yang dilakukan oleh Belanda dan Belanda hanya menyetujui kesepakatan pada hal yang menguntungkannya saja. Pada 17 Januari 1948 perjanjian Renville membuahkan hasil yang berisikan 12 pasal prinsip politik, 6 pasal tambahan lainnya dan 10 pasal tentang gencatan senjata.

Perjanjian Renville yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dianggap sangatlah merugikan. Perjanjian Renville ini berisikan penetapan Republik Indonesia yang kian menyulitkan, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin kecil karena dibatasi dengan wilayah-wilayah kekuatan bangsa Belanda. Dengan ini, bangsa Belanda beranggapan selalu bisa untuk membuat bangsa Indonesia merasa terpojok. Pemerintah Belanda

melakukan pengajuan dengan ketidakmampuannya atas perjanjian Renville yang telah disepakati dengan menyebutkan dengan beranggapan bahwa Republik Indonesia sudah melakukan suatu hubungan diplomatik dengan negara Uni Soviet. Anggap Belanda tersebut mengenai wakil Republik Indonesia yang bernama Souripno yang berada di Praha telah melakukan penukaran pejabat konsuler Moskow dan Yogyakarta. Ini merupakan pelanggaran yang besar menurut Kerajaan Belanda yang berasaskan pasal 1 dan 6 pasal tambahan tentang perjanjian Renville.

Pemerintahan Republik Indonesia sendiri menganggap ini sesuai dengan perjanjian Renville yang dideklarasikan oleh Roep dan Sultan Hamengku Buwono yang telah digeledasikan Kerajaan Belanda pada tanggal 10 Juni 1948. Isi dari deklarasi ini merupakan tambahan dari perjanjian Renville pada tanggal 28 Mei 1948, tentang tidak adanya pemerintahan Republik Indonesia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 1 dan 6 pasal tambahan lainnya. Asas ini berlandaskan atas pandangan terhadap perjanjian, bukan berdasarkan untuk sarana mencapai kesepakatan politik.

Belanda banyak melakukan kericuhan yang menuduh Republik Indonesia, sehingga para pembicara antara Republik Indonesia dan Belanda menjadi tidak lancar. Perdana Menteri Beel ditunjuk untuk wilayah Seberang melakukan plebisit yang harus dilakukan untuk wilayah-wilayah yang bersengketa. Akan tetapi, Bangsa Belanda menolak untuk melakukan plebisit tersebut. Ketidakmampuan bangsa Belanda atas hasil dari perjanjian Renville ini terbukti dengan adanya pengeluaran maklumat secara resmi atas pembicara Republik Indonesia dan Belanda

yang berbunyi, Republik Indonesia harus mengubah sikap radikalnya dalam melaksanakan perjanjian Renville pada tanggal 11 Desember 1948. Pemerintah Kerajaan Belanda menyampaikan kepada Komisi Tiga Negara terhadap perjanjian Republik Indonesia dan Belanda tidak mendatangkan hasil apabila tidak menjunjung tinggi tentang perjanjian kesepakatan gencatan senjata.

M. Hatta mendesak KTM untuk melakukan perjanjian lagi dengan bangsa Belanda pada tanggal 13 Desember 1948, dengan ketentuan kesediaan Republik Indonesia diakui kedaulatannya secara penuh oleh pihak Belanda pada masa peralihan. Melalui telegram yang dikirimkan pada tanggal 10 Desember 1948 untuk menteri daerah seberang supaya dilakukannya aksi militer Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Beel menerima telegram ini atas perintah dari kerajaan Belanda pada tanggal 18 Desember 1948. Akan tetapi, adanya telegram dari M. Hatta ini membuat kebingungan dari pemerintah Belanda terkait dilakukannya agresi. Pada tanggal 17 Desember 1948 Beel tetap mendesak dengan memberikan telegram kepada KTN yang berlangsung di Kaliurang. Ditambah lagi Republik Indonesia mengalami peristiwa G30S PKI yang telah di ketahui oleh pihak Belanda.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresinya dengan melakukan pengeboman dengan pesawat tipe Mithell B25 yang melancarkan aksinya di lapangan Maguwo di Yogyakarta. Dari peristiwa ini banyak sekali korban jiwa yang ditanggung oleh pihak Republik Indonesia.

Hasil dari Perjanjian Roem-Royem

Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, Belanda belum mengakui bahwa Indonesia sudah resmi merdeka secara resmi. Belanda melakukan agresi militer kepada Indonesia sebanyak dua kali. Dengan diboncengi NICA yang ingin melakukan kependudukan lagi di wilayah Indonesia. Agresi militer Belanda ke II berhasil menduduki wilayah Yogyakarta serta mengasingkan presiden, wakil presiden dan para menteri. Sebelum tertangkap presiden Soekarno memberikan perintah kepada Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia secara darurat di wilayah Sumatera.

Walaupun presiden Soekarno berhasil menyerahkan mandatnya ke Syarifudin Prawiranegara, Belanda tetap berhasil menyerang Yogyakarta serta menghancurkan semua sistem telekomunikasi yang berupa stasiun radio agar tidak bisa melakukan pengiriman pesan. Terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia darurat ini didasarkan atas keinginan sendiri Syarifudin Prawiranegara dengan tokoh setempat. Walaupun presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Syarifudin Prawiranegara, ia tidak menganggap dirinya sebagai presiden. Melainkan sebagai ketua dari PDRI untuk mempertahankan NKRI.

Agresi militer Belanda ke II yang dimulai pada tahun 1948 ini menarik perhatian dunia internasional dan PBB yang kemudian melakukan perundingan untuk Indonesia dan Belanda. Belanda yang diwakili oleh Van Royen dan Indonesia yang diwakili oleh Moh. Roem. Perundingan tersebut dilaksanakan di sebuah hotel yang bernama Des Indies. Pada perundingan ini Belanda membuat persyaratan mau melakukan perundingan dengan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan

dan bukan dengan PDRI. Atas syarat yang diberikan Belanda ini membuat kebingungan diantara para pemimpin Republik Indonesia untuk mewakili perundingan tersebut. Pada akhirnya presiden Soekarno dan wakil presiden M. Hatta memutuskan Moh. Roem untuk sebagai perwakilan dari pihak Republik Indonesia dalam perundingan tersebut. Ini membuat para pemimpin PDRI, dan Tentara Indonesia merasa keberatan dengan keputusan tersebut, karena Moh. Roem adalah salah pemimpin dari Partai Masyumi. Atas unsur keterpaksaan ini akhirnya Moh. Roem akhirnya mewakili Republik Indonesia atas desakan dari pihak Belanda.

Pada tanggal 14 April 1949 perundingan tersebut dimulai dengan diawasi oleh Komisi BFO dan PBB dengan membentuk UNCI. Pada tanggal 7 Mei 1949 membuahkan hasil dengan ditandatanganinya perundingan tersebut oleh Roem dan Royen. Moh. Roem mengemukakan dalam perundingan sebagai berikut: 1). Memberikan perintah kepada Republik Indonesia untuk menghentikan perang gerilya. 2). Berkerjasama untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama. 3). Moh. Roem ikut serta dalam KMB, supaya Belanda secepatnya menyerahkan kedaulatan rakyat kepada RIS dengan tanpa syarat.

Sedangkan perwakilan Belanda Van Royen mengatakan: 1). Memberikan setuju pemerintahan Republik Indonesia ke wilayah Yogyakarta. 2). Menghentikan agresi militer dan membebaskan tahanan yang ditawan. 3). Tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. 4). Menyetujuinya bentuk Negara Indonesia Serikat. 5). Berupaya mempercepat adanya KMB setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali di Yogyakarta. Inilah hasil dari

perundingan tersebut dengan menghasilkan perjanjian Roem-Royen yang telah disetujui oleh kedua belah pihak antara Indonesia dan Belanda.

Perjanjian Roem-Royen yang dihasilkan tersebut ternyata menimbulkan masalah di Indonesia dalam kalangan para pemimpin PDRI dan Partai Masyumi. Dari kalangan Partai Masyumi menganggap mandat yang diberikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta kepada Moh. Roem dalam melakukan perundingan adalah sah. Menurut Moh. Roem dari hasil perundingan tersebut dalam membuat eksistensi Republik Indonesia di mata dunia internasional supaya lebih mendapatkan pengakuan kedaulatan, ini bertujuan untuk kepentingan dari Republik Indonesia sendiri.

Setelah kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke wilayah Yogyakarta. Disisi lain, ketua dari PDRI Syarifudin Prawiranegara tidak menerima perjanjian Roem-Royen tersebut, karena alasan mandat yang diberikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta tidak sah. Pada saat pemberian mandat tersebut Soekarno dan M. Hatta dalam keadaan ditawan oleh Belanda. Secara resmi ini tidak begitu kuat, berbeda dengan pemberian mandat untuk Syarifudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI, karena Soekarno dan M. Hatta dalam keadaan belum ditawan.

Syarifudin Prawiranegara menolak perjanjian Roem-Royen karena alasan bisa saja sewaktu-waktu Belanda bisa mendesak Indonesia lagi untuk melakukan perundingan dengan KTM. Ditambah lagi setiap melakukan perundingan seringkali tidak membuahkan hasil, dan seringkali mengalami kerugian dari perundingan tersebut yang dimana tidak menguntungkan Bangsa Indonesia. Belanda mengetahui bahwa pada

saat itu Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M. Hatta dalam keadaan ditawan oleh Belanda.

Syarifudin Prawiranegara juga menolak perjanjian Roem-Royen, seharusnya Moh. Roem harus melakukan perundingan terlebih dahulu dengan PDRI sebelum mengambil keputusan. Mengingat pada agresi militer Belanda ke II tersebut, Jenderal Soedirman dan Tentara Indonesia dalam posisi yang menguntungkan untuk membuat pasukan Belanda mundur dari Yogyakarta.

Dilakukannya Perjanjian Renville

Perjanjian Renville bersamaan dengan diangkatnya Menteri Amir Syarifuddin untuk mengganti kabinet Sutan Syahrir. Pada saat itu, presiden Soekarno memberi perintah kepada Amir Syarifuddin untuk mendirikan kabinet baru untuk menggantikan posisi kabinet Sutan Syahrir. Presiden Soekarno berharap dengan dibentuknya kabinet baru ini dapat menyelesaikan masalah pertingkaian antara Indonesia dan Belanda. Disisi lain, keikutsertaan Dewan Keamanan Dunia (PBB) mendirikan sebuah komisi yang bernama Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara Belanda dan Indonesia dengan anggota dari beberapa negara yaitu Belgia, Australia dan Amerika Serikat. Dibentuknya KTN ini bertujuan untuk perundingan yang akan diselenggarakan oleh PBB.

Perundingan yang diikuti sertakan oleh anggota-anggota KTN ini diselenggarakan pada 8 Desember 1947, yang berada diatas kapal Perang milik Amerika Serikat (USS Renville) pada saat itu berlabuh di pelabuhan

Tanjung Priok, Jakarta. Tokoh-tokoh yang mewakili perundingan di KTN tersebut dari Indonesia adalah Richard C Kirby (Australia), perwakilan dari pihak Belanda adalah Paul Van Zeeland (Belgia) dan wakil dari KTN adalah Frank B. Graham (Amerika Serikat) yang berperan sebagai pihak netral dalam perundingan KTN.

Adapun isi hasil dari perjanjian Renville yang di adakan KTN tersebut sebagai berikut: 1). Diakuinya Jawa, dan Sumatra sebagai wilayah Republik Indonesia oleh Belanda. 2). Dibuatnya garis demarkasi untuk memisahkan wilayah Republik Indonesia dan Belanda di Indonesia. 3). Ditariknya Tentara Indonesia dari Jawa Barat dan Jawa Timur untuk mundur dari daerah kekuasaan Belanda di Indonesia.

Masa Peralihan Kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta

Perjanjian Renville yang diselenggarakan oleh Komisi Tiga Negara untuk melakukan perundingan antara pihak Belanda dan pihak Republik Indonesia. Pada tanggal Januari 1948 perundingan yang dibantu oleh Komisi Tiga Negara ini dilakukan diatas Kapal Perang Amerika Serikat (USS Renville) yang berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pihak Belanda dalam perundingan tersebut memaksakan kehendaknya terkait tentang bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pada perundingan ini pihak Belanda memberikan pernyataan terkait bisa memberikan kemerdekaan terhadap negara Republik Indonesia setelah berakhirnya masa peralihan kekuasaan yang sedang berlangsung. Pada masa peralihan kekuasaan, kedaulatan negara Republik Indonesia

berada dalam gengaman kekuasaan bangsa Belanda. Selain itu, bangsa Belanda ingin mendirikan system pemerintahan negara baru dengan berisikan negara buatannya yang bisa dijadikan boneka sewaktu-waktu demi kepentingan pribadi bangsa Belanda.

Dari pihak Republik Indonesia sendiri menolak mentah-mentah atas apa yang disebutkan bangsa Belanda tersebut. Karena Indonesia beranggapan bahwa apa yang dikatakan bangsa Belanda tersebut akan memberikan kerugian besar kepada Indonesia ke depannya. Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara Belanda dan Indonesia selalu saja tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 17 Desember 1948 perundingan mengalami kegagalan bagi pihak Indonesia pada perundingan yang diselenggarakan oleh Komisi Tiga Negara, dimana pihak Belanda memberikan nota kepada Indonesia yang berisikan syarat.

Akan tetapi, bangsa Indonesia tidak berhasil melakukannya dengan tetap waktu. Karena waktu yang diberikan oleh bangsa Belanda tersebut terlalu singkat bagi bangsa Indonesia untuk memenuhi nota atas keinginan bangsa Belanda tersebut. Ini merupakan pemicu awal terjadinya agresi militer Belanda ke II.

Berhasilnya dibuat perjanjian Roem-Royen atas perundingan antara pihak Belanda dan Indonesia dengan bantuan dari Komisi Tiga Negara, kemudian dilakukan persiapan untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta serta melakukan suatu tindakan untuk memberhentikan aksi-aksi kerusuhan. Pada tanggal 24 Juni 1949 persiapan itu membuahkan hasil yang manis, dimana pemerintah Belanda

memberikan perintah kepada para tentaranya untuk segera mundur dan mengosongkan wilayah Yogyakarta dengan secepatnya,

Supaya pemerintahan Indonesia bisa mempersiapkan pemindahan kekuasaannya di Keresidenan Yogyakarta pada saat itu. Sebelumnya pada tanggal 6 Juli 1949 presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta tiba di Yogyakarta dari tempat mereka ditawan Belanda dulu di Bangka Belitung. Tidak berselang lama pada tanggal 13 Juli 1949 dilakukannya sidang kabinet perdana untuk mengembalikan mandate dari Syarifudin Prawiranegara ke presiden Soekarno dan wakil presiden M. Hatta serta melakukan pengangkatan terhadap Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjadi Menteri pertahanan negara.

Komisi BFO sering melakukan perundingan yang membahas tentang penetapan pemerintahan Belanda untuk membentuk pemerintahan federasi Nasional Indonesia pada saat masa peralihan kekuasaan sebelum terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tanggal 16 Juli 1949 Komisi BFO menerima saran dari presiden Soekarno untuk menyelenggarakan konferensi Nasional. Konferensi ini dilakukan sebanyak dua kali untuk membentuk pemerintahan sementara pada saat peralihan kekuasaan. Pertemuan pertama dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949 dan pertemuan kedua dilakukan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1949.

Pertemuan perdana tersebut membuahkan hasil yang berisikan tentang pertahanan di Yogyakarta. Tujuan dari konferensi ini untuk persiapan kedepannya untuk Konferensi Meja Bundar yang sebentar lagi yang akan diselenggarakan. Konferensi perdana ini untuk membahas

tentang 11 pasal dengan para pemimpin Republik Indonesia dengan pemimpin dari daerah-daerah yang berkerjasama untuk hubungan federasi Nasional untuk membicarakan tentang peralihan kekuasaan Republik Indonesia didalam perundingan Konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan mendatang. Dengan begitu, supaya hal-hal yang berkaitan dengan sengketa memungkinkan untuk dibahas terlebih dahulu di Konferensi Meja Bundar yang berhubungan dengan Republik Indonesia dalam federasi Nasional.

Tujuan bangsa Belanda yang memisahkan daerah-daerah Republik Indonesia mengalami kegagalan total, ini merupakan hasil dan pencapaian dari hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dengan BFO yang dilakukan secara Konferensi. Konferensi antara Republik Indonesia dengan BFO ini diselenggarakan di Yogyakarta yang berhubungan dengan bentuk sistem negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Tujuan utama dari dilakukannya konferensi antara Republik Indonesia dengan BFO ini bertujuan untuk mencari titik kesepakatan dari kedua belah pihak, supaya bisa diajukan dalam perundingan KMB untuk menghadapi pihak Belanda.

Dilakukannya Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar merupakan suatu perundingan yang dilakukan untuk mempertemukan bangsa Belanda dan Republik Indonesia untuk melakukan perjanjian yang akan di sepakati bersama. Konferensi Meja Bundar ini diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga pada tanggal 2 November 1949, yang di laksanakan di Den Haag. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Belanda dan Republik Indonesia untuk

mencari kesepakatan bersama, berguna untuk pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara penuh dan utuh serta tanpa syarat dari pihak bangsa Belanda.

Akibat dari agresi militer Belanda ke II di Indonesia mendapatkan perhatian dimata dunia internasional serta menjadi sorotan bagi Dewan Keamanan Dunia (PBB). Keikutsertaan PBB dalam mencampuri urusan antara bangsa Belanda dengan Republik Indonesia ini menandakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak bangsa ini menjadi salah satu persoalan dunia pada saat itu. Untuk itu Dewan Keamanan Dunia (PBB) menggelar suatu konferensi Meja Bundar yang diikuti oleh pihak Belanda dengan Republik Indonesia untuk melakukan perundingan. Masing-masing dari kedua belah pihak negara tersebut mengutuskan perwakilannya untuk menghadiri konferensi Meja Bundar tersebut yang diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB.

Konferensi Meja Bundar tersebut akhirnya membuahkan hasil yang telah disepakati bersama. Adapun hasilnya sebagai berikut: 1). Diakuinya Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat oleh bangsa Belanda. 2). Diselesaikannya masalah terkait wilayah Irian Jaya. 3). Konferensi Meja Bundar akan mengatur bentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat. 4). Dibentuknya Uni Belanda-Indonesia untuk Republik Indonesia Serikat membayarkan hutangnya ke pihak Hindia Belanda. 5). Belanda meminta untuk pengembalian haknya atas perusahaannya di Republik Indonesia Serikat. 6). Terpilihnya Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 1949. Demikian

pula hasil dari diadakannya Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan oleh Dewan Keamanan Dunia (PBB).

KESIMPULAN

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan melalui proklamasi kemerdekaan. Sebagai negara yang baru mereka, Indonesia membutuhkan pengakuan kedaulatannya oleh negara lain bahwasanya Indonesia telah merdeka. Akan tetapi, Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia itu. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure serta menyerahkan kekuasaannya secara utuh dengan tanpa syarat ke Indonesia. Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, Bangsa Indonesia banyak melakukan serangkaian upaya perundingan dengan bangsa Belanda.

Dimulainya dari perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville dan perjanjian Roem-Royen. Tujuan Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan cara ingin menghancurkan dan memusnahkan Republik Indonesia yang pada saat itu kedatangan Belanda diboncengi dengan NICA beserta sekutu. Kemudian Belanda melakukan agresi militernya. Dari tindakan Belanda terhadap Indonesia mendapatkan sorotan dari mata dunia internasional yang membuat dewan keamanan PBB ikut campur untuk menyelesaikan masalah antara Belanda dan Indonesia.

Keikutsertaan PBB dalam masalah antara Belanda dan Indonesia bisa dilihat melalui diselenggarakannya perundingan-perundingan, yang kemudian dibentuknya KTN untuk melakukan perundingan tersebut

supaya tercapainya kesepakatan bersama yang menghasilkan perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Akan tetapi, perundingan tersebut sering kali tidak membuahkan hasil. Dimana pihak Indonesia selalu dirugikan akibat dari pihak Belanda yang sering melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat. Untuk itu, akhirnya dewan keamanan PBB menggelar Konferensi Meja Bundar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam perundingan Konferensi Meja Bundar tersebut menghasilkan pasal-pasal untuk permasalahan antara Belanda dan Indonesia. Salah satu hasil perundingan yang dibuat dalam pasal tersebut adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar tersebut. Dengan begini berakhirlah sudah perselisihan antara Belanda dan Indonesia.

Saran untuk generasi muda penerus bangsa supaya agar selalu tetap menjaga keutuhan serta selalu memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai seorang generasi muda bangsa, sebaiknya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang bermanfaat serta berguna bagi Nusa dan Bangsa. Supaya negara tercinta Indonesia tidak dijajah lagi oleh bangsa Barat.

Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah suatu usaha yang sangat berat serta harus banyak mengalami proses yang telah dilakukan oleh para pahlawan bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi para pahlawan harus melewati proses untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dengan berbagai macam

perundingan dengan proses yang panjang dan melelahkan, hingga pada tahun 1949 Bangsa Indonesia resmi diakui kedaulatannya secara de facto dan de jure oleh bangsa Belanda melalui hasil Konferensi Meja Bundar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervani, E. S. (2019). Politik Diplomasi Perdana Menteri Amiri Syarifudin Dan Perjanjian Renville. *Swarnadwipa*, 3(1).
- Handayani, D. J. (2018). Peranan Imogiri Pada Masa Perang Kemerdekaan II Tahun 1948-1949. *Ilmu Sejarah*, 3(6).
- Handayani, D. J. (2018). Peranan Imogiri Pada Masa Perang Kemerdekaan II Tahun 1948-1949. *Ilmu Sejarah-S1*, 3(6).
- Hasan, F. R. (2009). Status Hukum Perjanjian Pengalihan Hutang Antara Indonesia Dan Belanda Dalam Konferensi Meja Bundar. (*Doctoral dissertation, Universitas Airlangga*).
- Insaniwati, I. N. (2002). Mohamad Roem, Karier Politik Dan Perjuangannya 1924-1968. *IndonesiaTera*.
- Juliantara, T. (2021). Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi Masyumi Menanggapi Perjanjian Roem-Royen Tahun 1949. *Inteleksia-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 2(2), 373-392.
- Kharisma, D. N. (2016). Kota Malang Pada Masa Agresi Militer Belanda I Tahun 1947. *Avatara*, 4(3).
- Kila, K. (2021). Perang Appa Sulapa dalam Menghadapi Agresi Belanda di Malino. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*).
- Sari, D. I. (2014). Tinjauan Historis Implementasi Isi Perjanjian Linggarjati Indonesia dan Belanda Tahun 1946-1947. *Pesagi (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 2(4).

Susilo, A. &. (2021). Perjanjian Linggarjati (Diplomasi dan Perjuangan Bangsa Indonesia Tahun 1946-1947). *Crikserta: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 30-42.